

Analisis Indikator Pendidikan di Indonesia Periode 1994 – 2022

Faradiba Faradiba*¹, Marteda Veronika Nomleni²

^{1,2}Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
Email: ¹faradiba@uki.ac.id, ²marteda@uki.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan aspek mendasar dalam membangun suatu negara. Melalui pendidikan masyarakat dapat terangkat harkat, martabat, serta kesejahteraannya. Telah banyak program pendidikan yang sudah diterapkan pemerintah selama 3 dekade terakhir. Oleh sebab itu diperlukan kajian untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Indikator Pendidikan di Indonesia periode 1994-2022 berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Buta Huruf, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 1994-2022. Data ini dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar sebesar 85%. Untuk pendidikan menengah dan tinggi angka partisipasi berturut-turut mencapai 58% dan 16%. Partisipasi sekolah pada tingkat menengah masih rendah meskipun telah adanya aturan tentang wajib belajar 15 tahun yang telah dikeluarkan pemerintah. Angka buta huruf di Indonesia selama periode 1994-2022 mengalami penurunan di semua kelompok umur. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah terkait pengentasan buta huruf berjalan dengan baik. Namun, perlu dilakukan pendekatan kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui peran serta pemerintah maupun pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kata kunci: Buta Huruf, Partisipasi Sekolah, Pendidikan Indonesia, Wajib Belajar

Abstract

Education is a fundamental aspect in developing a country. Through education, society can raise its dignity and prosperity. The government has implemented many educational programs over the last 3 decades. Therefore, studies are needed to determine the development of education in Indonesia. This research aims to examine education indicators in Indonesia for the period 1994-2022 based on School Enrollment Rates (APS), Gross Enrollment Rates (APK), Pure Enrollment Rates (APM) and Illiteracy Rates, using quantitative descriptive analysis methods. The data used in this research comes from secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) during the 1994-2022 period. This data was generated from the National Socioeconomic Survey (Susenas). The school enrollment rate in basic education is 85%. For secondary and higher education, the participation rates reached 58% and 16%, respectively. School participation at the secondary level is still low even though the government has issued regulations regarding 15 years of compulsory education. The illiteracy rate in Indonesia during the 1994-2022 period has decreased in all age groups. This indicates that government programs related to illiteracy eradication are running well. However, it is necessary to approach the community regarding the importance of education at the middle and high levels to improve the quality of human resources in Indonesia. This effort can be carried out through the participation of the government and the private sector through the Corporate Social Responsibility (CSR) program.

Keywords: Compulsory Education, Illiteracy, Indonesian Education, School Participation

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah merayakan kemerdekaannya selama lebih dari 69 tahun. Cita-cita dan harapan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa kini menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus dijalankan demi meneruskan perjuangan nasional. Untuk memajukan kehidupan bangsa yang

mencintai tanah air, kita sebagai warga negara harus terus berupaya untuk mengarahkan kehidupan menuju hal yang lebih baik.

Pendidikan saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga bagi kemajuan suatu bangsa, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan negara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri mereka secara aktif. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Kondisi pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, masih banyak anak di berbagai daerah yang belum mendapat akses pendidikan karena berbagai alasan (Hewi & Shaleh, 2020; Prasetya & Pribadi, 2021; Pratiwi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum tercapai sepenuhnya. Tidak hanya di Indonesia, masalah pemerataan pendidikan juga menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi dengan baik di negara lain.

Masalah-masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia cukup kompleks. Beberapa contohnya meliputi permasalahan terkait kurikulum, mutu pendidikan, serta ketersediaan sumber daya manusia yang memengaruhi kualitas peserta didik. Masalah-masalah ini merata dari pendidikan dasar hingga tingkat yang lebih tinggi (Fadil et al., 2023; Patandung & Panggua, 2022; Saadah et al., 2023). Banyaknya masalah yang muncul seringkali dipicu oleh ketidakpuasan dari para pelaku pendidikan, termasuk tenaga pengajar dan kepala sekolah. Keluhan yang paling umum adalah terkait sistem administrasi yang berantakan dan birokrasi yang rumit. Selain itu, masalah kepemimpinan di lingkungan sekolah juga menjadi hal serius yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan (Hariyanto & Wahyudi, 2018; Margana et al., 2014).

Meskipun Indonesia telah merdeka cukup lama, masalah lain masih terus muncul. Masyarakat sering mengandalkan pemerintah untuk menjalankan semua sektor kehidupan dan berharap pemerintah menjadi arah dan pedoman bagi warga dalam menjalani kehidupan mereka. Namun, realitasnya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai polemik muncul, bahkan di dalam pemerintah sendiri, yang semakin memperpanjang masalah di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Keadaan dinamis ini merupakan dilema yang ironis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kurangnya arah yang jelas dalam sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia telah kehilangan unsur penting yang menggerakkan sistem pendidikan untuk mewujudkan cita-cita bersama Indonesia Raya.

Telah banyak penelitian yang mengkaji indikator pendidikan secara general (Herawati et al., 2020; Rizanti & Jufri, 2023; Tambunan et al., 2020), namun masih terbatas penelitian yang mengkaji terkait partisipasi sekolah dan buta huruf. Pendidikan merupakan aspek mendasar dalam membangun suatu negara. Melalui pendidikan masyarakat dapat terangkat harkat, martabat, serta kesejahterannya. Telah banyak program pendidikan yang sudah diterapkan pemerintah selama 3 dekade terakhir. Oleh sebab itu diperlukan kajian untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Indikator Pendidikan di Indonesia periode 1994-2022 berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Buta Huruf, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis deskriptif kuantitatif, sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan keadaan atau masalah secara objektif dengan menggunakan angka. Metode ini melibatkan pengumpulan data, interpretasi, dan analisis hasil masalah yang diteliti. Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menguji dan mengukur perhitungan matematis dan statistik. Dalam teknik deskripsi kuantitatif, data disajikan secara objektif dan terstruktur, meliputi grafik, tabel, matriks, laporan, dan angka terukur (Iskandar et al., 2023; Purba et al., 2021). Badan Pusat

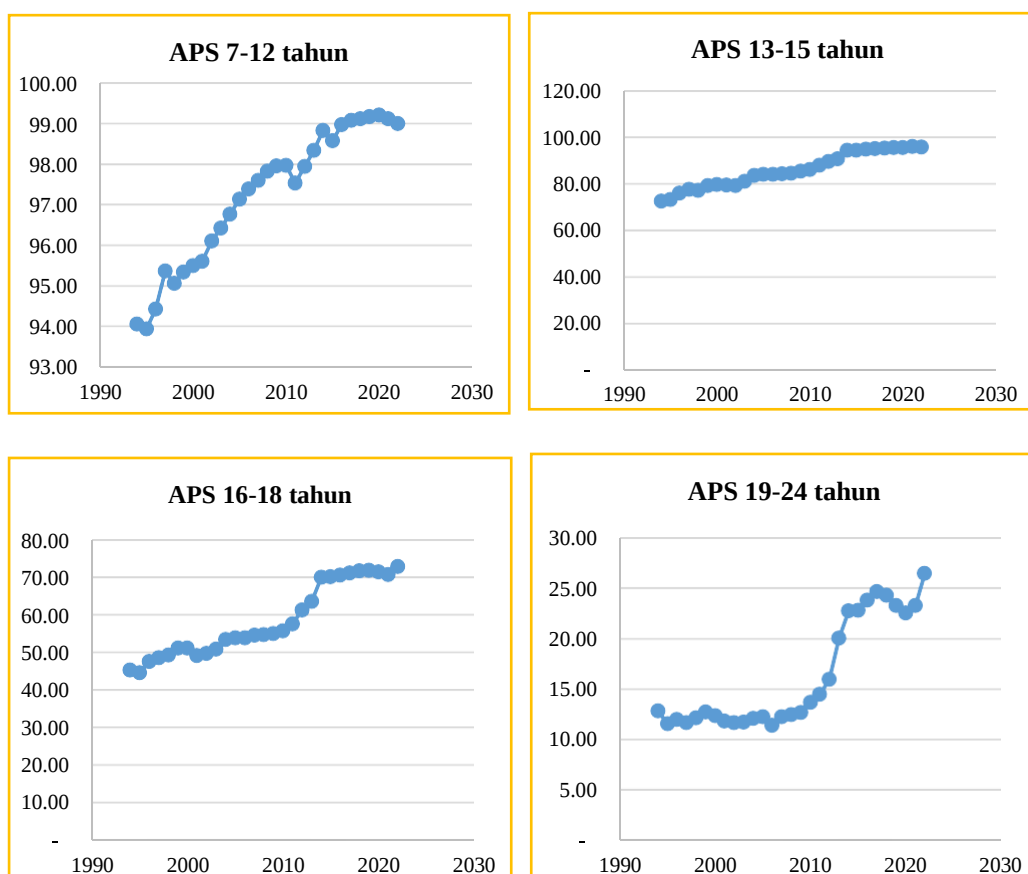
Statistik (BPS) menggunakan kuesioner pada kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai instrumen pengumpulan data untuk mengevaluasi Indikator Pendidikan di Indonesia periode 1994-2022, termasuk Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Buta Huruf dalam pendidikan formal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas pendidikan di Indonesia dapat diukur secara kuantitatif melalui berbagai faktor. Beberapa indikator yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dalam pendidikan formal, serta tingkat buta huruf. Data rata-rata indikator pendidikan di Indonesia selama periode 1994-2022 dapat ditemukan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rata rata Indikator Pendidikan Indonesia Tahun 1994-2022

Kelompok Umur (Tahun)	Indikator Pendidikan (%)		
	APS	APK	APM
7-12	97.22	107.64	94.24
13-15	85.87	82.03	67.74
16-18	58.37	61.56	47.45
19-24	16.24	16.51	12.48



Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 1994-2022

Dalam Gambar 1, terlihat grafik angka partisipasi sekolah untuk pendidikan formal selama periode 1994-2022, yang dibagi berdasarkan kelompok umur. Terdapat tren peningkatan yang signifikan untuk setiap kelompok umur. Namun, persentase partisipasi lebih rendah terlihat pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

Indonesia, seperti kebanyakan negara lain, telah menerapkan kebijakan wajib belajar sembilan tahun sebagai bagian dari upaya merealisasikan amanat UUD 1945 Pasal 1, UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 dan kemudian diperluas pada tahun 1994, yang menetapkan bahwa pendidikan wajib dilalui melalui sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sejalan dengan perkembangan, pada tahun 2015, Indonesia memperluas kebijakan wajib belajar hingga mencakup sekolah menengah atas, sebagai tanggapan terhadap dampak positif yang dirasakan dari kebijakan sebelumnya. Namun, meskipun kebijakan wajib belajar sembilan tahun telah diterapkan sejak tahun 1994, dampaknya terhadap pencapaian pendidikan belum mencapai hasil yang diharapkan (Agustang & Mutiara, 2021; Marisa, 2021; Setiawati, 2022).

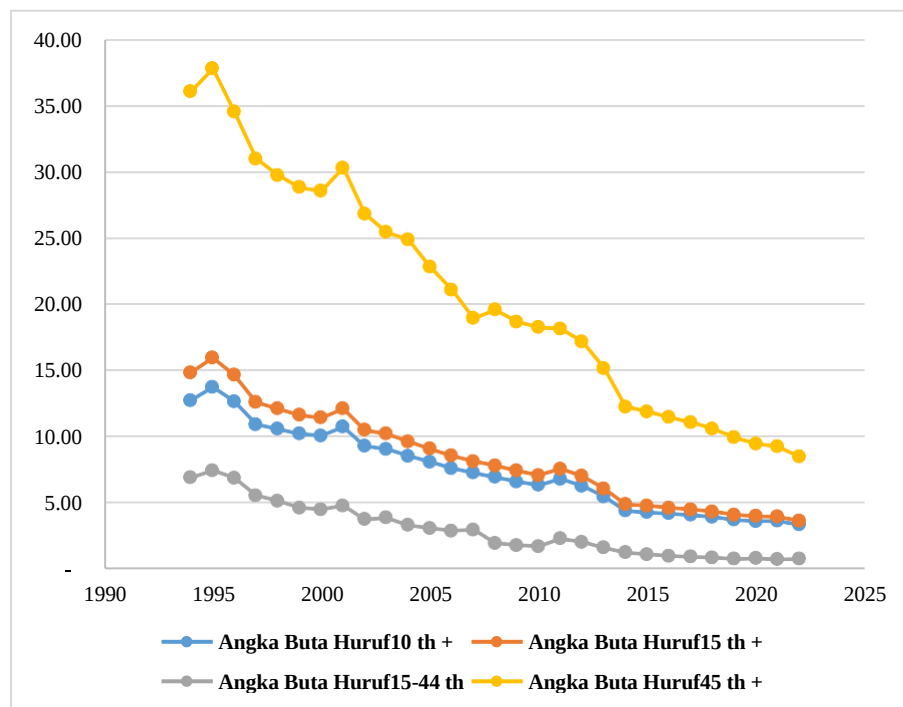
Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa terjadi penurunan persentase partisipasi sekolah secara bertahap hingga mencapai kelompok umur 19-24 tahun. Hal ini konsisten dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022, yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia diwajibkan menjalani pendidikan dasar selama 10 tahun (dari prasekolah hingga kelas 9) dan pendidikan menengah selama tiga tahun (Alfulaila, 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.

Berdasarkan Gambar 1, masih terlihat bahwa pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi (umur 19-24 tahun) belum dianggap sebagai kewajiban di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan yang mewajibkan pendidikan pada jenjang ini, sehingga persentase partisipasi pada jenjang tersebut mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan, kurangnya kesadaran akan pentingnya melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah, pengaruh lingkungan dan peran serta orang tua. Banyak di antara masyarakat, terutama yang berada dalam kelompok miskin, memilih untuk langsung bekerja setelah menamatkan pendidikan menengah (Farhani, 2024; Garnella, 2024; Rabiudin et al., 2022). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2020, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,19% atau setara dengan 27,55 juta orang. Kondisi ekonomi yang sulit, biaya kuliah yang tinggi, dan kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai manfaat pendidikan tinggi sebagai investasi untuk perbaikan kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor lainnya. Penyediaan informasi yang cukup tentang pengembalian investasi ekonomi melalui pendidikan dapat memberikan dampak positif dalam membujuk orang tua mengenai manfaat substansial dari pendidikan tinggi.

Tabel 2. Rata rata Angka Buta Huruf di Indonesia Tahun 1994-2022

Kelompok Umur (Tahun)	Buta Huruf (Persen)
10+	7.42
15+	8.39
15-44	2.94
45+	20.63

Berdasarkan data yang tertera dalam Tabel 2, terlihat rata-rata angka buta huruf selama periode 1994-2022 yang dibagi berdasarkan kelompok umur. Dapat dilihat bahwa tingkat angka buta huruf yang tinggi terjadi terutama pada kelompok umur 45 tahun ke atas.



Gambar 2. Angka Buta Huruf Tahun 1994-2022

Gambar 2 menyajikan Angka Buta Huruf (ABH) setiap tahun secara lebih rinci. Berdasarkan grafik untuk keempat kelompok umur, terlihat tren penurunan sejak tahun 1994. Hal ini mengindikasikan perbaikan dalam masalah buta huruf di Indonesia dari waktu ke waktu. Penurunan angka buta huruf menunjukkan kemajuan dalam kualitas pendidikan dasar di Indonesia, sesuai dengan hasil sebelumnya mengenai Angka Partisipasi Sekolah pada tingkat dasar. Meningkatnya kemampuan membaca dan menulis di kalangan masyarakat menjadi salah satu indikator positif. Upaya pemerintah dalam mengatasi buta huruf, seperti program Kejar Paket A, B, dan C, telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan ini. Meskipun demikian, meski terjadi penurunan angka buta huruf, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia telah sepenuhnya terbebas dari masalah buta huruf (Aufa, 2023; Fakhrizal, 2022; Sidabutar et al., 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa pada tahun 2021, sebanyak 9,24% penduduk Indonesia yang berusia 45 tahun ke atas mengalami buta huruf. Persentase Angka Buta Huruf (ABH) ini mengalami penurunan sebesar 26,82% dibandingkan dengan tahun 1994, ketika angka buta huruf mencapai 36,06%. Tingkat buta huruf untuk kelompok usia 45 tahun ke atas mencapai puncak tertinggi pada tahun 1995, yaitu sebesar 37,8%. Sementara itu, untuk kelompok usia 15-44 tahun, angka buta huruf turun menjadi 0,73% pada tahun 2022, menurun sebesar 6,17% dari tahun 1994 yang sebesar 6,9%. Demikian pula, untuk kelompok usia 15 tahun ke atas, angka buta huruf mencapai 3,96% pada tahun 2021, turun sebesar 10,88% dari tahun 1994 yang mencapai 14,84%. Selama 10 tahun terakhir, terjadi penurunan angka buta huruf sebesar 8,9% untuk kelompok usia 45 tahun ke atas, 1,58% untuk kelompok usia 15-44 tahun, dan 3,6% untuk kelompok usia 15 tahun ke atas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi sekolah pada pendidikan untuk pendidikan dasar melebihi 85% untuk rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Sementara itu, angka partisipasi sekolah untuk pendidikan menengah dan tinggi berturut-turut mencapai 58% dan 16%. Meskipun telah diberlakukan aturan wajib belajar 15 tahun oleh pemerintah, partisipasi sekolah pada tingkat menengah masih tergolong rendah. Namun, terdapat penurunan angka buta huruf di Indonesia selama 18 tahun terakhir di semua kelompok umur, menunjukkan bahwa program pemerintah terkait pengentasan buta huruf berjalan dengan baik. Diperlukan pendekatan kepada

masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui peran serta pemerintah maupun pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustang, A., & Mutiara, I. A. (2021). *Masalah Pendidikan di Indonesia*.
- Alfulaila, N. (2022). *Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar (Teori dan Praktik)*. Kanhaya Karya.
- Aufa, N. (2023). Pemberantasan buta aksara untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 319–328.
- Fadil, K., Amran, A., & Alfaien, N. I. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(1).
- Fakhrizal, Y. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1).
- Farhani, A. (2024). *Strategi Pemerintah Kabupaten Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bener Meriah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Garnella, R. (2024). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh*. UIN Ar-Raniry.
- Hariyanto, E., & Wahyudi, A. (2018). *Penguatan Keluarga Sakinah Berbasis Gerakan Nasional revolusi Mental*. Duta Media Publishing.
- Herawati, E. S. B., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 87–100.
- Hewi, L., & Shaleh, M. (2020). Refleksi hasil PISA (the programme for international student assesment): Upaya perbaikan bertumpu pada pendidikan anak usia dini. *Jurnal Golden Age*, 4(01), 30–41.
- Iskandar, A., Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. H. S. (2023). *Dasar Metode Penelitian*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Margana, S., Semedi, P., Kartadinata, S., Suryawan, I. N., Ahimsa-Putra, H. S., Saifuddin, A. F., & Supriyoko, K. (2014). *Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014*.
- Marisa, M. (2021). Inovasi kurikulum “Merdeka Belajar” di era society 5.0. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, 5(1), 66–78.
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805.
- Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32–42.
- Pratiwi, H. (2021). Permasalahan Belajar Dari Rumah Bagi Guru Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 130–144.
- Purba, E., Purba, B., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Rabiudin, R., Sumarsi, S., Katmas, E., Karfin, K., & Ituga, A. S. (2022). Edukasi keberlanjutan studi guna ketuntasan pendidikan tinggi bagi siswa sekolah menengah atas di Papua Barat: Tinjauan Pendidikan, Karir dan Ekonomi. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services*, 2(2), 124–141.
- Rizanti, W. N., & Jufri, A. W. (2023). Peningkatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Bahan Ajar IPA Berbantuan Media Game. *Journal of Classroom Action Research*, 5(1), 114–120.

- Saadah, N., Wastri, L., & Trisoni, R. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 15(2), 227–238.
- Setiawati, F. (2022). Dampak kebijakan perubahan kurikulum terhadap pembelajaran di sekolah. *NIZĀMULILMI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–17.
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 86–101.
- Tambunan, P., Ardiansyah, M. F., & Kurniawan, M. G. (2020). Pengaruh Suasana Lingkungan Belajar Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Produktif. *Jurnal Pensil: Pendidikan Teknik Sipil*, 9(3), 175–182.
- Undang-undang Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (2003).

Halaman Ini Dikosongkan